

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BOGOR MELALUI PENDEKATAN ANGGARAN DAN REGULASI

Poverty Reduction Strategy in city of Bogor through the Budget and Regulatory Approach

Yusuf Dardiri¹, Sri Hartoyo², dan Ma'mun Sarma³

¹ Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Kota Bogor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
E-mail: yusuf.legislatif@gmail.com.

²Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB. E-mail: shty@indo.net.id

³Staff Pengajar Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi & Manajemen IPB.
E-mail: mamun_sarma@yahoo.com

ABSTRACT

The issue of poverty is a major problem in Indonesia, including in the city of Bogor. The number of poor household in the city of Bogor is fluctuating, from 2004 to 2010 has increased from 21.914 poor household in 2004 become 43.749 poor households in 2007. Sub sequently stable in the period 2008 to 2009 and a slight decrease in 2010 becoming 40.876 households. The year 2012 has increased to 42 328 households. City Government always increase direct spending as a way to reduce poverty. Based on the results of the regression analysis, it turns out increasing direct spending City Government, however, the number of poor households is increasing, it is likely caused by the presence of one target in a program conducted by the City Government.

Key Word: Poverty, City of Bogor, direct spending

ABSTRAK

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan utama di Indonesia termasuk di Kota Bogor. Jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bogor mengalami fluktuasi, maka sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan dari angka 21.914 KK pada tahun 2004 menjadi 43.749 KK miskin pada tahun 2007. Selanjutnya stagnan pada periode 2008 sampai 2009 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 40.876 KK. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 42.328 KK. Pemerintah Kota Bogor selalu meningkatkan belanja langsung sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis regresi, ternyata semakin meningkatnya belanja langsung Pemerintah Kota Bogor, ternyata jumlah KK miskin selalu meningkat, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya salah sasaran dalam program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Kata Kunci: Kemiskinan, Kota Bogor, Belanja Langsung

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah serius yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Banyaknya masalah yang dihadapi saat ini baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan berakar pada kemiskinan.

Lingkaran setan dari kemiskinan apabila tidak segera diputus maka akan selalu menghasilkan generasi selanjutnya yang miskin pula. Kemiskinan pada ujungnya akan menghambat pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan utama di Indonesia termasuk di

Kota Bogor. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor memperlihatkan adanya peningkatan pada 2004-2007, namun kemudian terjadi penurunan pada 2007-2011. Penduduk miskin pada tahun 2004 mencapai 85.317 jiwa dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 yaitu sebesar 97.700 jiwa. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kota Bogor menurun menjadi 88.940 jiwa.

Jika ditinjau berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bogor, maka sejak tahun 2004 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan dari angka 21.914 KK pada tahun 2004 menjadi 43.749 KK miskin pada tahun 2007. Selanjutnya stagnan pada periode 2008 sampai 2009 dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 40.876 KK. Tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 42.328 KK.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dijadikan sebagai skala prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa sektor atau satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan dan dikoordinasikan oleh sebuah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggung jawab langsung kepada walikota Bogor.

Perumusan Masalah

Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi perekonomian yang cukup baik di wilayah Jawa Barat. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (LPE) selama tahun 2004-2009 berada di atas 6 persen. Angka pendapatan per kapita di Kota Bogor juga meningkat secara tajam. Pada tahun 2004 besar pendapatan per kapita di Kota Bogor adalah Rp 4.871.882 dan pada tahun 2009 meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 12.287.122. Dari segi angka Indeks Pembangunan Manusia, Kota Bogor juga memiliki angka IPM yang relatif tinggi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada

tahun 2004, angka IPM Kota Bogor sebesar 74,64 dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 75,48. Dengan keadaan perekonomian yang selalu meningkat, sudah sepantasnya masyarakat Kota Bogor merasakan tingkat kesejahteraan yang baik. Peningkatan jumlah belanja baik langsung maupun tidak langsung dalam APBD Kota Bogor diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Namun dalam kenyataannya masih terdapat sekitar 10 persen penduduk Kota Bogor yang masih berada dalam keadaan miskin. Hal ini memperlihatkan pembangunan belum efektif menekan angka kemiskinan dan belum terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Kota Bogor. Beberapa permasalahan yang ada adalah:

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan dan sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kota Bogor dan bagaimana tingkat hubungan faktor-faktor tersebut?
2. Sejauhmanakah keefektifan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini? Bagaimana dampak-dampaknya? Bagaimanakah strategi penanggulan kemiskinan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan sumber daya yang ada?

Tujuan Kajian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka Kajian Pembangunan Daerah dengan judul Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor melalui Pendekatan kebijakan Anggaran dan Regulasi mengandung tujuan utama untuk menyusun strategi Pemerintah Kota Bogor dalam menanggulangi kemiskinan. Adapun tujuan spesifiknya antara lain adalah :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor
2. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik kemiskinan di Kota Bogor
3. Mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menanggulangi kemiskinan dan selanjutnya merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota bogor

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Kemiskinan tidak lahir dengan sendirinya, juga tidak muncul bukan tanpa sebab. Orang-orang miskin muncul bukan karena mereka malas atau boros. Mereka miskin bukan pula karena nasibnya yang sedang sial sehingga menjadi miskin. Mereka menjadi miskin karena ada faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik yang sebagian besar dipengaruhi oleh kebijakan dan program pemerintah. Diantara faktor-faktor tersebut tentunya ada yang berpengaruh besar ada pula yang berpengaruh sedang atau kecil.

Adanya realitas kemiskinan di Kota Bogor saat ini merupakan buah dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kota Bogor yang diduga tidak efektif karena tidak memperhatikan situasi dan kondisi yang ada sehingga penurunan jumlah KK miskin tidak terlalu signifikan setidaknya jika dilihat dari peningkatan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang karakteristik kemiskinan di Kota Bogor termasuk di dalamnya tentang factor-faktor yang mempengaruhi dan tingkat pengaruhnya. Di samping itu juga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan pemerintah Kota Bogor.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh atau menjadi penyebab kemiskinan, karakteristik kemiskinan serta evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor maka diharapkan bisa dirumuskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan

yang lebih efektif mampu mengurangi jumlah KK miskin di Kota Bogor.

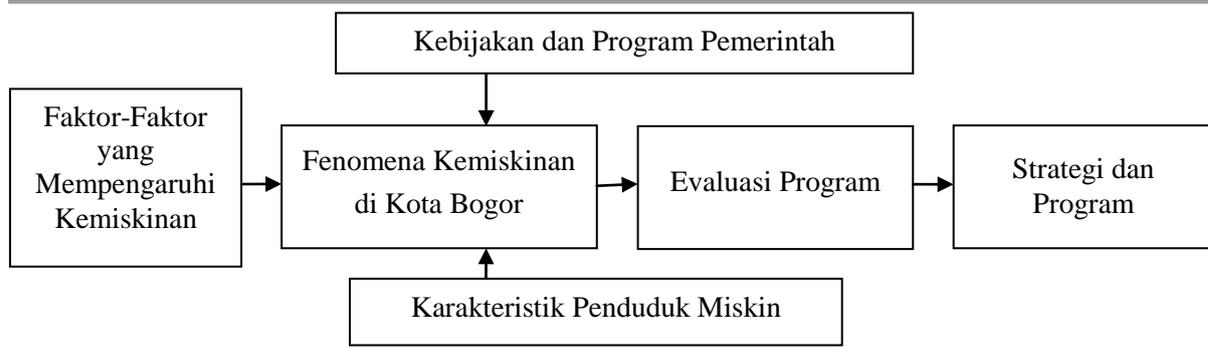
Lokasi dan Waktu Kajian

Kajian dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini di seluruh 6 wilayah Kecamatan di Kota Bogor diharapkan dapat mencakup keseluruhan permasalahan kemiskinan di Kota Bogor. Waktu Kajian selama tiga bulan yaitu bulan Maret – Mei 2012.

Metode Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui tatap muka, dialog dan focus group discussion (fgd) dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang mengetahui dan menjadi pelaku program penanggulangan kemiskinan. Mereka terdiri dari kalangan pejabat eksekutif dan legislatif yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan. Juga kalangan pekerja social, LSM, wartawan, peneliti, akademisi, dan pihak-pihak yang memiliki minat dan menggeluti masalah kemiskinan. Data primer ini untuk mendapatkan tujuan kajian evaluasi program dan rumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor.

Sedangkan data sekunder bersumber dari studi kepustakaan, data kedinasan maupun dari publikasi instansi resmi. Data sekunder meliputi data indikator makro, data jumlah penduduk miskin, KK miskin, jumlah pengangguran, angka rata-rata lama sekolah, data APBD, data besar belanja langsung APBD, jumlah penduduk miskin dan indek harga konsumen (IHK). Data primer ini diperlukan untuk menjawab tujuan kajian tentang identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan serta karakteristik kemiskinan di Kota Bogor.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Kajian

Metode Analisa Data

Untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah KK miskin digunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang digunakan untuk menduga nilai variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent) dengan menggunakan lebih dari satu variabel bebas (independent). Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang diduga mempengaruhi jumlah KK miskin, digunakan persamaan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 BA + \beta_2 PG - \beta_3 LS + \epsilon(t)$$

dimana:

- Y(t) : Jumlah KK miskin
- BA : Belanja Langsung APBD
- PG : Jumlah Pengangguran
- LS : Rata-rata Lama Sekolah

Adapun hipotesa hubungan dari variable-variabel eksogen ini terhadap variable endogen adalah:

- BA : Belanja Langsung APBD berkorelasi negatif terhadap jumlah KK miskin
- PG : Jumlah Pengangguran berkorelasi positif terhadap jumlah KK miskin
- LS : Rata-rata Lama Sekolah berkorelasi negatif terhadap jumlah KK miskin

Metode Perancangan Program

Analisis penyusunan strategi dan pilihan program menggunakan analisis SWOT berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak terkait.

GAMBARAN UMUM

Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Bogor adalah 950.334 orang dengan rincian 484.791 laki-laki dan 465.543 perempuan. *Sex ratio* Kota Bogor tahun 2010 adalah 104 dan jumlah rata-rata anggota 4 orang per rumah tangga. Kepadatan jumlah penduduk di Kota Bogor adalah 8.020 orang/km². Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Bogor Tengah yaitu 12.472 orang/km², dan kepadatan terendah ada di Kecamatan Bogor Selatan yaitu 5.887 orang/km².

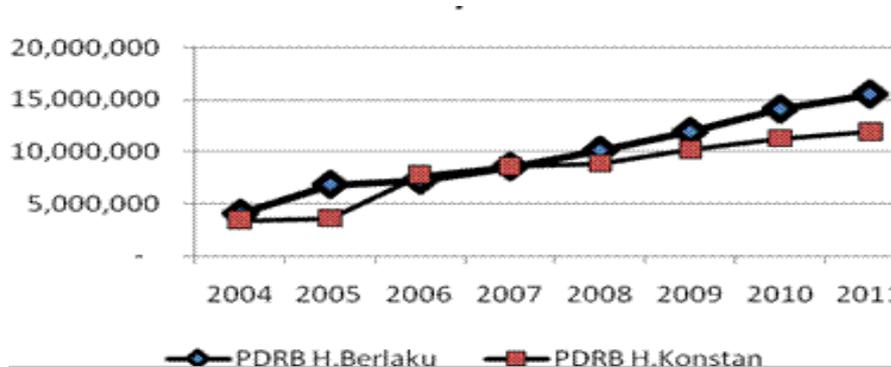
Berdasarkan usia, penduduk Kota Bogor tahun 2010 didominasi oleh penduduk usia 25-29 tahun sebanyak 93.032 jiwa sedangkan penduduk dengan usia 70-74 memiliki jumlah paling sedikit yaitu 11.164 jiwa. Penduduk Kota Bogor pada usia produktif (15-59 tahun) menempati porsi yang paling besar yaitu 66,6% sedangkan penduduk usia muda (0-14 tahun) memiliki porsi sebesar 27,1% dan penduduk usia tua (60-75 tahun ke atas) memiliki porsi sebesar 6,3.

Kondisi Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor terbilang cukup baik. Selama 2004-2011, angka LPE Kota Bogor berkisar antara 5,98 – 6,12 persen. Perkembangan nilai PDRB Kota Bogor tahun 2011 dibandingkan dengan nilai PDRB 2010

masing-masing juga terjadi peningkatan dan kenaikan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp 15.487.434.000.000 sedangkan tahun 2010 sebesar Rp 14.070.351.000.000.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011 sebesar Rp 11.921.664.000.000, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp 11.240.993.000.000.



Gambar 2. Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Tahun 2004-2011

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

Kondisi Kemiskinan di Kota Bogor

Angka kemiskinan di Kota Bogor dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin dan atau jumlah kepala keluarga (KK) miskin. Tinjauan berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin menggambarkan jumlah kemiskinan secara keseluruhan. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin dan KK miskin di Kota Bogor tahun 2004-2011 cenderung sedikit meningkat. Jumlah penduduk miskin tahun 2004 sebanyak 85.317 jiwa dan pada tahun 2011 menjadi 88.940 jiwa.

Adapun jumlah KK miskin tahun 2004 adalah sebesar 21.914 KK dan pada tahun 2011 menjadi 42.475 jiwa. Jika dihitung berdasarkan rata-rata jumlah penduduk di Kota Bogor, maka persentase penduduk miskin di Kota Bogor adalah sebesar 9,82 persen. Adapun rata-rata jumlah KK miskin berdasarkan jumlah seluruh KK di Kota Bogor adalah sebesar 18,3 persen (BPS Kota Bogor, 2010). Jika dihitung proporsinya berdasarkan jumlah penduduk miskin dan KK miskin, maka rata-rata setiap KK miskin di Kota Bogor hanya terdiri dari 2,3 jiwa/KK.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota Bogor

Hasil analisis regresi berganda (*multiple regression*) memperlihatkan bahwa tiga variabel yang dikaji yaitu belanja langsung APBD riil, jumlah pengangguran dan angka rata-rata lama sekolah mempengaruhi jumlah KK miskin di Kota Bogor. Persamaan regresi memiliki nilai F yang nyata pada taraf 5 persen, artinya persamaan ini memiliki model yang baik, selanjutnya persamaan regresi berganda ini, dengan tiga variabel bebas yang terbentuk memiliki koefisien determinan sebesar 0,546 yang berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan tersebut berpengaruh sebesar 54,6 persen, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar ketiga variabel tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, pada model yang dianalisis tidak terdapat multikolinear, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF yang semuanya tidak ada yang lebih dari 10. Dari tiga variabel eksogen, hanya variabel belanja langsung APBD yang berpengaruh nyata pada 5 persen terhadap kemiskinan yang terjadi di Kota Bogor. Sedangkan variabel lainnya, yaitu jumlah pengangguran dan rata-rata lama

sekolah tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah keluarga miskin di Kota Bogor. Tanda dari koefisien belanja langsung tidak sesuai dengan yang diharapkan,

karena bernilai positif, seharusnya sesuai dengan teori adalah negatif.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda terhadap Faktor – faktor yang Mempengaruhi KK Miskin di Kota Bogor

Uraian	Koefisien	T Stat	VIF
F	4.002**		
R ²	0.546		
Intersep	197949.648	1.305	
Belanja Langsung APBD (BA)	7.382E-6	3.171***	1.748
Jumlah Pengangguran (PG)	-18433.339	-1.159	1.484
Rata-rata Lama Sekolah (LS)	-0.026	-0.270	1.237

Keterangan:

***) nyata pada taraf uji 1%, **) nyata pada taraf uji 5%, *) nyata pada taraf uji 10%

Oleh karena itu interpretasi dari nilai koefisien belanja langsung adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar Rp 1 juta, maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,38 orang. Hal ini dapat saja terjadi, karena Kota Bogor merupakan daerah penyangga daerah ibukota, sehingga tidak sedikit masyarakatnya merupakan masyarakat pendatang dari sekitar wilayah Kota Bogor, selain itu tidak sedikit yang berasal luar provinsi Jawa Barat, sehingga peluang terjadinya salah sasaran dari program Pemerintah Kota dalam mengurangi kemiskinan dapat terjadi. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Secara rinci hasil analisis regresi berganda pada kajian ini dapat dilihat pada Lampiran 1. Adapun dalam bentuk persamaan dapat dilihat pada persamaan berikut ini:

$$Y = 197949.64 + 7.382E-6BA - 18433.33PG - 0.026LS$$

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bogor

Pada Tabel 2 dapat dilihat beberapa strategi untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bogor berdasarkan hasil analisis SWOT.

Strategi penanggulangan Kemiskinan

1. Peningkatan Kualitas SDM Penduduk Miskin

Program ini sangat diperlukan dalam rangka mempersiapkan SDM penduduk miskin untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang terus berkembang di Kota Bogor. Program ini dapat berupa penyelenggaraan pendidikan formal gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan penyelenggaraan “Kejar Paket ABC” bagi penduduk miskin usia lanjut. Program tersebut juga dapat ditambah dengan penyelenggaraan pelatihan keterampilan usaha seperti perbengkelan, pertukangan, tata boga, tata busana dan sebagainya terutama bagi warga miskin yang ingin berwirausaha.

Program seperti di atas sebetulnya sebagian telah dilaksanakan oleh Pemkot

Bogor, namun barangkali intensitasnya perlu ditingkatkan dan juga sasaran pesertanya harus benar-benar diperhatikan. Program ini hanya ditujukan untuk keluarga miskin yang terdaftar bukan untuk mereka yang berada di luar kelompok keluarga miskin. Apabila dalam pelaksanaannya menemui kendala terutama keterbatasan aparat

penyelenggara, maka dapat melibatkan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan. Demikian halnya jika terkendala oleh masalah pendanaan dalam APBD, maka Pemkot Bogor dapat meminta bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor.

Tabel 2. Hasil Analisis SWOT Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor

	Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
	1. Letak strategis Kota Bogor 2. Kondisi perekonomian Kota Bogor 3. Komitmen Pemkot Bogor 4. Program penunjang berjalan baik	1. Kurang terserapnya penduduk miskin 2. Kondisi SDM penduduk miskin 3. Belum tersedianya data kemiskinan 4. APBD Kota Bogor belum mengarah
Peluang (Opportunities)		
1. Dukungan Pemerintah Pusat 2. Pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 3. Banyaknya investor luar 4. Dukungan akademis.	Pemutakhiran data penduduk miskin secara periodik.	1. Peningkatan kualitas pendidikan, pengetahuan dan keterampilan penduduk miskin Kota Bogor. 2. Pembuatan kebijakan yang mengharuskan investor untuk mempekerjakan warga Kota Bogor. 3. Penyusunan program APBD yang fokus pada penanggulangan kemiskinan
Ancaman (Threats)		
1. Migrasi penduduk 2. Banyaknya produk luar 3. Penguasaan SDA oleh swasta 4. Ancaman globalisasi.	Pengaturan penduduk pendatang yang berencana tinggal menetap	Pencegahan penguasaan lahan oleh swasta secara berlebihan yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal Kota Bogor.

2. Kebijakan Mempekerjakan Penduduk Miskin Kota Bogor

Kebijakan ini tidak memerlukan anggaran APBD yang besar, cukup dengan membuat SK Walikota atau Perda yang mengharuskan pengusaha di Kota Bogor mempekerjakan penduduk miskin dalam setiap usaha mereka. Namun tentu saja kebijakan ini akan direspon dengan baik jika program penyiapan SDM penduduk miskin telah berhasil baik. Para pengusaha pada intinya akan mempekerjakan

karyawan yang memiliki kelayakan untuk bekerja.

Kenyataan yang terjadi selama ini di Kota Bogor adalah bahwa banyak kegiatan ekonomi kurang melibatkan penduduk Kota Bogor sebagai pekerjanya. Mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, para pengusaha dibebaskan untuk memilih tenaga kerja dari daerah manapun. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja asal Kota Bogor terlebih lagi bagi penduduk miskin.

Kenyataan yang terjadi selama ini di Kota Bogor adalah bahwa banyak kegiatan ekonomi kurang melibatkan penduduk Kota Bogor sebagai pekerjanya. Mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, para pengusaha dibebaskan untuk memilih tenaga kerja dari daerah manapun. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja asal Kota Bogor terlebih lagi bagi penduduk miskin.

3. Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kota Bogor

Data memegang peranan penting dalam menentukan sebuah kebijakan. Pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor sangat diperlukan dalam menentukan target dan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan program peningkatan kualitas SDM penduduk miskin sangat tergantung dari keakuratan data penduduk miskin.

Selama ini pendataan penduduk miskin sudah dilaksanakan namun perlu lebih ditingkatkan dengan perincian dan pemutakhiran data secara periodik. Hal ini disebabkan data kependudukan adalah data dinamis yang selalu berubah pada waktu-waktu tertentu. Perubahan keadaan di lapangan yang cepat akan menyebabkan data lama yang dimiliki menjadi tidak berguna.

4. APBD Yang Berfokus Pada Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil, kajian diketahui bahwa pengaruh belanja langsung (*public*) dalam APBD terhadap KK miskin berpengaruh nyata walaupun angkanya positif. Kenaikan belanja langsung akan menyebabkan bertambahnya KK miskin. Daya ungkit belanja langsung riil adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar Rp 1 juta, justru akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,38 orang. Hal ini berarti diperlukan evaluasi belanja langsung riil yang selama ini direncanakan dan dikeluarkan agar tepat sasaran mampu mengurangi angka

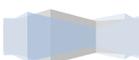
kemiskinan. Evaluasi itu meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Di tingkat perencanaan tercermin dalam integrasi program dan tidak tumpang tindih sedangkan di tahap pelaksanaan mampu menyerap tenaga dari keluarga miskin.

Penyusunan APBD yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berarti bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Jika tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 149 milyar dan tersebar di berbagai SKPD, maka untuk tahun-tahun ke depan angka tersebut perlu ditingkatkan. Selain ditingkatkan, alokasi APBD tersebut juga tidak terlalu banyak disebar ke beberapa SKPD.

5. Kebijakan Pengaturan Penduduk Pendetang

Kebijakan pengaturan penduduk pendatang sudah banyak diterapkan di beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan ini bukan berarti melarang penduduk untuk datang ke satu daerah. Namun kebijakan ini mengatur lalu lintas kedatangan penduduk sedemikian rupa sehingga lebih tertib dan dalam rangka membantu peningkatan pelayanan publik. Penduduk yang dipantau terutama yang berkeinginan untuk menetap lebih dari tiga bulan di satu daerah.

Pelaksanaannya di beberapa daerah adalah dengan memantau tempat-tempat kedatangan penduduk seperti terminal, stasiun, pelabuhan, bandara dan sebagainya. Penduduk pendatang diberi semacam kartu kedatangan yang berlaku tiga bulan. Jika penduduk pendatang belum mendapatkan pekerjaan selama tiga bulan di tempat dimaksud, maka yang bersangkutan dihimbau untuk keluar dari kota tersebut. Jika mereka berhasil mendapatkan pekerjaan, maka mereka diarahkan untuk menjadi penduduk tetap. Dengan cara ini dapat dipastikan penduduk pendatang yang menetap adalah bukan calon penduduk miskin.



Penduduk pendatang banyak terdapat di Kota Bogor. Mereka terutama memilih profesi sebagai pedagang kaki lima, pekerja non formal lain dan sebagian kecil bekerja di sektor swasta yang ada di Kota Bogor. Selama ini pendataan terhadap mereka belum berjalan dengan baik. Belum adanya kebijakan yang menertibkan keberadaan penduduk pendatang menyebabkan keberadaan mereka tidak teridentifikasi. Penduduk miskin Kota Bogor yang sudah terdata dan diberdayakan tentu lebih berhak memperoleh kesempatan bekerja dan berusaha dibandingkan para pendatang. Hal tersebut dapat terjadi jika Pemerintah Kota Bogor ingin menyelesaikan persoalan kemiskinan di daerahnya.

6. Pencegahan Penguasaan Lahan Oleh Swasta Secara Berlebihan

Pencegahan penguasaan lahan oleh swasta secara berlebihan terutama yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal Kota Bogor sangat diperlukan. Potensi munculnya kemiskinan baru antara lain disebabkan oleh berpindahnya kepemilikan lahan strategis dari penduduk lokal kepada investor swasta. Penduduk lokal yang mengalami hal tersebut kemudian pindah ke wilayah pinggiran yang kurang potensial dengan infrastruktur rendah. Mereka tinggal jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan akses mereka terhadap peluang ekonomi berkurang.

Pemerintah Kota Bogor perlu membuat kebijakan yang membatasi kepemilikan lahan oleh swasta. Hal ini dapat dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memastikan di mana wilayah yang dapat dikembangkan oleh investor swasta dan di mana wilayah yang menjadi wilayah pemukiman penduduk lokal. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi di wilayah Kec. Bogor Selatan di mana pihak swasta banyak menguasai lahan dan mengembangkannya menjadi pemukiman, pertokoan dan pusat rekreasi

modern. Namun pada saat bersamaan wilayah Kec. Bogor Selatan menjadi wilayah dengan jumlah KK miskin terbesar di Kota Bogor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Permasalahan kemiskinan di Kota Bogor merupakan permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Bogor merupakan daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bogor pada tahun 2004-2011 berada pada kisaran angka 6 persen. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Bogor juga terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 79,4. Namun pada saat bersamaan jumlah KK miskin di Kota Bogor mencapai 42.475.

Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor, ternyata belanja langsung APBD berkorelasi positif, artinya dengan meningkatnya belanja langsung dari Pemerintah Kota Bogor, maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dapat menandakan terjadinya salah sasaran dalam penuntasan kemiskinan di Kota Bogor.

Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Bogor, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor berdasarkan hasil analisis SWOT adalah: (a) peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk miskin Kota Bogor, (b) pembuatan kebijakan yang mengharuskan investor untuk mempekerjakan warga Kota Bogor terutama penduduk miskin, (c) pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor secara periodik, (d) penyusunan program APBD yang lebih berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dengan porsi anggaran yang memadai, (e) pengaturan penduduk pendatang yang berencana tinggal menetap agar tidak mempengaruhi upaya pemberdayaan

penduduk miskin Kota Bogor dan (f) pencegahan penguasaan lahan oleh swasta secara berlebihan terutama yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal Kota Bogor.

Saran

Pemerintah Kota Bogor pada dasarnya telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan selama beberapa tahun. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan program tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor sebaiknya didahului dengan kajian akademik agar lebih sistematis dan terencana dengan baik.
2. Perlu dibuat database berkaitan dengan kemiskinan di Kota Bogor dalam sebuah sistem informasi penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor agar dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas.
3. Program penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor perlu lebih diprioritaskan dalam APBD dengan alokasi anggaran yang memadai.
4. Perlu senantiasa dilakukan koordinasi antara berbagai instansi yang berperan dalam keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor baik yang berhubungan dengan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya sehingga berkurangnya

angka kemiskinan di Kota Bogor dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Bogor. 2013. Kota Bogor Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kota Bogor, Bogor.
- Mankiw, NG. 2003. Pengantar Ekonomi, Edisi ke-2, Jilid ke-2. Haris M, penerjemah; Wisnu CK, editor. Jakarta: Penerbit Erlangga. Terjemahan dari : *Principles Of Economics*.
- Pemerintah Kota Bogor. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 2009-2014. Sekretariat Daerah Kota Bogor, Bogor.
- Saputro, A.E.S. dan Utomo, A.P. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Secara Makro Di Lima Belas Provinsi Tahun 2007. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, Vol. 6., No. 2. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta.
- Todaro, M. P. dan S.C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi, Edisi ke-8. Haris M, penerjemah; Wisnu CK, editor. Jakarta: Penerbit Erlangga. Terjemahan dari: *Economic Development*.



Lampiran 1. Hasil Analisa regresi Berganda

REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER BA LS PG.

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PG, LS, BA ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.739 ^a	.546	.409	7084.79370

a. Predictors: (Constant), PG, LS, BA

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.026E8	3	2.009E8	4.002	.041 ^a
	Residual	5.019E8	10	5.019E7		
	Total	1.105E9	13			

a. Predictors: (Constant), PG, LS, BA

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	197949.648	151720.149		1.305	.221		
	BA	7.382E-6	.000	.894	3.171	.010	.572	1.748
	LS	-18433.339	15909.558	-.301	-1.159	.274	.674	1.484
	PG	-.026	.096	-.064	-.270	.793	.809	1.237

a. Dependent Variable: Y